

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pers di Indonesia memiliki genetika politik yang kental sejak kelahirannya karena terhubung langsung sebagai instrumen pergerakan kemerdekaan. Watak ini hadir pers di Hindia-Belanda tumbuh beriringan dengan apa yang disebut oleh Benedict Anderson sebagai bangkitnya fenomena kapitalisme cetak (*print-capitalism*). Menurutnya: “Dengan bahasa-bahasa-cetak, mereka jadi lebih memahami apa kata orang lain, setelah dicomblangi tinta dan kertas...lantas membentuk komunitas yang dibayangkan secara nasional, dalam ketidakkasatmataaan yang tampak (*visible invisibility*), sekular, partikular” (Anderson, 2008, h. 66).

Dari Eropa, semangat zaman ini kemudian mewujud dalam lanskap sejarah kolonial Hindia-Belanda. Lewat catatan Ahmat Adam, momentum paling jelas terjadi pasca krisis ekonomi 1884, ketika para pengusaha Tionghoa termotivasi mencoba keberuntungan sebagai pemilik modal percetakan (Adam, 1995, h. 63). Kebangkitan pers Tionghoa ditandai pada tahun 1886. Bangkrutnya perusahaan cetak *Gebroeders Gimberg & Co.* membuat surat kabar *Bintang Timor* yang biasa menyoroti isu rakyat pulau Jawa dan lainnya jatuh ke tangan Baba Tjoa Tjoan Lok. Sementara itu, Lie Kim Hok dari Buitenzorg membeli mesin cetak dan pada 1886–1887 melahirkan karya-karya Melayu yang jadi pondasi sastra modern. Gelombang ini terus meluas dari *Sinar Terang* (1888) di Batavia, *Pertja Barat* (1894) di Padang bersama Dja Endar Moeda, hingga *Tjahaja Sumatra* (1898).

Gelombang dominasi pers Tionghoa menemukan bentuk lainnya ke dalam pembentukan kesadaran sosial-ekonomi baru. Kesadaran ini dimotori oleh *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) yang didirikan pada 17 Maret 1900. THHK adalah organisasi pendidikan modern yang menjadikan sekolah asrama sebagai sarana membangun disiplin, pengetahuan, dan solidaritas etnis. Pendirian THHK disambut kebijakan Politik Etis. Pada tahun 1901, Politik Etis diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, membawa implikasi penting bagi pertumbuhan pers berbahasa pribumi (Adam, 1995, h. 179). Efek dari kemajuan di bidang kesadaran menumbuhkan pers berbahasa Melayu Rendah yang mempermudah akses distribusi wacana. Terinspirasi oleh perkembangan ini, segelintir intelektual muda Indonesia—di antaranya Abdul Rivai, R.M. Tirta Adhi Soerjo, dan Dja Endar Moeda—ikut menyerukan perlunya modernisasi masyarakat mereka (Adam, 1995, h. 179).

Khususnya Tirta, nampak jika terdapat model pengadopsian strategi gerakan lewat surat kabar dan organisasi yang lebih dulu digunakan oleh masyarakat Tionghoa. Sebelum mendirikan *Medan Prijaji*, Tirta lebih dulu mencoba eksperimen dengan mengemudikan keredaksian *Soenda Berita* yang rilis pada tahun 17 Agustus 1903. Koran ini memiliki relasi yang dekat dengan THHK, seperti yang ditulis oleh Adam:

“...dalam edisi perdana bahwa 20 persen keuntungan dari langganan akan disumbangkan kepada *Tiong Hoa Hwee Koan*, *White Cross Colony* di Salatiga (rumah bagi orang Kristen miskin), serta lembaga kesejahteraan yang melayani pribumi di Semarang; ia juga berjanji menyumbangkan 20 persen dari pendapatan iklan kepada badan amal. Motif Tirta di sini jelas untuk menarik pembaca dan pemasang iklan dari kalangan Tionghoa, Eurasia, bahkan Eropa, selain dari pembaca pribumi. Namun, isi terbitan ini terutama berkaitan dengan persoalan pribumi Indonesia” (Adam, 1995, h. 109).

Eksperimen awal itu kemudian beralih wahana menjadi lebih matang dalam konstelasi pembangunan gerakan nasionalisme. Pada 1 Januari 1907 Tirto mendirikan *Medan Prijaji* dengan dukungan modal dari Jaksa Kepala Cirebon, Raden Mas Temenggoeng Pandji Arjodinoto. Meski namanya secara harfiah berarti “arena bagi priyayi”, isinya—kebanyakan ditulis langsung oleh Tirto Adhi Soerjo—justru menunjukkan keberpihakan yang kuat pada rakyat kecil, terutama dalam menyerukan keadilan bagi orang kecil atau kaum miskin Indonesia (Adam, 1995, h. 115). Tidak lagi sekadar menjaring simpati lintas etnis, Medan Prijaji hadir sebagai mingguan pribumi pertama yang sepenuhnya mandiri.

Menjelang pertengahan 1911, popularitasnya melampaui banyak koran berbahasa lokal lainnya, dengan oplah harian meningkat dari sekitar 1.000 menjadi 2.000 eksemplar (Adam, 1995, h. 119). Di sinilah Tirto menegaskan garis politik yang lebih radikal dibanding *Soenda Berita*, lantang mengkritik priyayi korup, pejabat Belanda, hingga sistem kolonial itu sendiri yang membuatnya digugat pencemaran nama baik dan harus berhadapan dengan hukum kolonial. (Adam. 1995, h. 113-114).

Jejak radikalisme pers yang dirintis Tirto kemudian mewarnai lanskap pers Indonesia pada dekade-dekade berikutnya. Namun, transformasi paling radikal terjadi ketika pers tidak lagi sekadar menjadi penyebar kabar. Rianne Subijanto mencatat bahwa pada periode 1920-1926, muncul gelombang baru surat kabar Hindia-Belanda. Pers revolusioner (atau pers *revolutionair*) yang mengidentifikasi dirinya sendiri ini merupakan perkembangan dari pers vernakular sebelumnya, yang mana pers itu sendiri, bersama dengan partai politik dan serikat pekerja, telah menjadi suara rakyat terjajah di seluruh Hindia Belanda (sekarang Indonesia) (Subijanto, 2017, h. 1357). Tradisi pers memihak, mengemban misi penerangan, dan

berfungsi sebagai alat pengorganisir massa inilah menjadi cikal bakal lahirnya surat kabar partai. Salah satunya adalah *Harian Rakjat*, milik Partai Komunis Indonesia.

Koran yang semula bernama *Suara Rakjat* yang terbit pada 31 Januari 1951 tersebut, merupakan martir wacana PKI untuk menyebarkan wacana partai yang ditumpu oleh ilmu jurnalistik. Sekapur sirih, *Harian Rakjat* didirikan pada 31 Januari 1951 oleh Siauw Giok Tjhan, wartawan, anggota Konstituante, sekaligus pendiri Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Ia memimpin dua tahun pertama sebelum digantikan oleh Njoto yang menjadi dewan redaksi *Harian Rakjat* hingga akhir hayatnya pada 1965. Selain Njoto, Mula Naibaho membantunya sebagai penanggung jawab redaksi. *Harian Rakjat* bekerja dengan asas “turun ke bawah”, “dari massa kembali ke massa”, serta praktik “kritik dan otokritik” dijalankan sebagai upaya untuk terus meningkatkan “mutu ideologi dan mutu jurnalistik”.

Harian Rakjat memiliki rubrik-rubrik tetap yang jadi ruang hidup pembacanya. Ada kolom, tinjauan luar dan dalam negeri, Marxisme-Leninisme, ekonomi, serta pendidikan. Selain itu, *Harian Rakjat* juga mempunyai rubrik khusus seperti “Ruangan Kebudajaan” “HR Muda”, “HR Sport dan Film”, “Ruangan Wanita”, “Surat Pembaca”, “Arti Kata-kata Asing”, “Wong Tjilik” di pojok, dan “Editorial”. Keberadaan rubrik-rubrik tersebut menandakan jika *Harian Rakjat* menyuguhkan informasi yang komprehensif dan kontekstual kepada pembacanya. Terutama keberadaan diskursus kebudayaan. Ruang kebudayaan menjadi sangat menarik karena dari semua elemen seni akan ditampung oleh *Harian Rakjat*, baik itu seni musik, patung, lukis, film, seni pertunjukan ketoprak, tari, wayang, ludruk, karikatur, dan lainnya (Yuliantri dan Dahlan, 2008, h. 79). Meski begitu *Harian Rakjat* masih berfokus

pada kesenian sastra, ketimbang yang lain. Dalam keterangan Agam Wispi, “Ruangan Kebudayaan HR menerima pukul rata 20 sampai 30 sadjak tiap bulan, 5 sampai 7 tjerita pendek tiap bulan, satu dua essay sastra dalam 5 bulan dan beberapa artikel-artikel kebudayaan” (Wispi, 1960, h. 3).

Terdapat dua dinamika haluan politik kenegaraan yang *Harian Rakjat* arungi di zaman kekuasaan Soekarno. Pertama ketika *Harian Rakjat* berdiri pada tahun 1951 yang otomatis menandai jalannya Demokrasi Parlemen (1949-1959). Kemudian delapan tahun setelah kelahiran *Harian Rakjat*, haluan negara berubah menjadi demokrasi terpimpin (1959-1965). Transisi zaman ini mempengaruhi sikap keredaksian koran, baik secara ideologis atau praktis dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

Perbedaan ini dapat dilihat dari karakteristik *Harian Rakjat* di era Demokrasi Parlemen yang memiliki fokus untuk membangun publikasi kelas pekerja. Oleh karena itu, fungsi utama SDM adalah membentuk opini publik dalam hal keyakinan dan praktik perubahan revolusioner berdasarkan perjuangan kelas (Groves, 1983, h. 31). Upaya pembentukan opini publik *Harian Rakjat* dilakukan dengan cara menitikberatkan sisi objektif jurnalistik ke definisi kerakyatan yang disesuaikan dengan ideologi partai. Karena itu, Njoto dapat menyatakan bahwa “objektivitas” tidaklah bertentangan dengan sikap “memihak”, sebab baginya konsep objektivitas justru berakar pada kebenaran objektif yang terkandung dalam dialektika materialisme historis satu-satunya bentuk objektivitas yang ia anggap sah (Groves, 1983, h. 43). Dengan kata lain, dinamika *Harian Rakjat* pada pembabakan haluan negara ke dalam Demokrasi Parlemen berusaha meletakkan pijakan filosofis keredaksiannya.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, *Harian Rakjat* bertransformasi menjadi koran yang membela Manipol atau termasuk ke dalam golongan Manipolis. Sisi filosofis keredaksian yang sudah matang mempengaruhi pengambilan sikap politik. Ketika koran kanan tidak terlalu hirau dengan Manifesto Politik, *Harian Rakjat* tampil ke depan menggembar-gemborkan Manipol, anti imperialis, dan menganggap koran-koran kanan telah menghina Presiden dengan tak mendukung Manipol sepenuh hati (Yuliantri dan Dahlan, 2008, h. 78). Dalam pandangan keredaksiannya: “Sikap ini merupakan tanggung jawab politik keredaksian, pendeknja HR mengemban amanat penderitaan Rakjat. Itulah warna HR, itulah sikap HR, itulah semangat HR, sebagai sumbangan Kepada perdjuaan nasional jang besar menudju masjarakat jang adil dan makmur” (“Tesis Dasawarsa HR”, 1961, h. 3).

Sikap keredaksian *Harian Rakjat* pada era Demokrasi Terpimpin mendorong wacana jika kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari politik. Paradigma yang dikeluarkan oleh Njoto disaat kongres pertama Lekra pada 24 sampai dengan 28 Januari 1959 menjadi simbol semangat zama berkebudayaan *Harian Rakjat*. Njoto menegaskan jika “politik sebagai panglima” adalah kondisi yang nyata untuk kebutuhan revolusi pada era Demokrasi Terpimpin. Di sini, organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) perlu mendapat perhatian khusus karena berusaha keras secara ideologi dan praktik berperspektif kerakyatan membangun budaya Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri.

Selayang pandang mengenai Lekra, organisasi ini didirikan pada 17 Agustus 1950 oleh D.N. Aidit, M.S. Ashar, A.S. Dharta, dan Njoto. Lekra tak mengenal adanya kepemimpinan yang hirarkis dan komando dari atas ke bawah atas kehidupan kreativitas seniman (Dahlan, 2008, h. 34). Secara kelembagaan Lekra terdiri dari struktur Sekretariat

Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting. Selain itu, Lekra juga memiliki lembaga kreatif yang otonom, diisi oleh anggota pimpinan pusat, seperti Lembaga Senirupa Indonesia (Lesrupa), Lembaga Film Indonesia (LFI), Lembaga Sastra Indonesia (Lestra), Lembaga Senidrama Indonesia (LSDI), Lembaga Musik Indonesia (LMI), dan Lembaga Seni Tari Indonesia. Menurut Rex Mortimer, keanggotaan Lekra di tahun 1965 telah mencapai 5 juta massa (Mortimer, 2011, h. 471).

Tujuan didirikan Lekra adalah untuk melaksanakan revolusi Indonesia secara sungguh-sungguh. Apabila merujuk Kongres pertamanya, tujuan ini diakibatkan revolusi Agustus 1945 dinilai belum selesai akibat pemerintah Indonesia masih tidak bisa otonom secara politik yang tercermin lewat diplomasi Konferensi Meja Bundar (KMB). Secara struktural dampak yang terasa karena politik yang tidak otonom tersebut menurut pembacaan Lekra adalah rakyat Indonesia masih setengah jajahan. Dalam Mukadimah tahun 1950 dan Peraturan Dasar I yang disahkan pada 1950, Lekra melihat situasi budaya semacam ini telah meracuni dan merusak-binasakan budi-pekerti dan jiwa Rakyat Indonesia. Maka dari itu misi utama dari Lekra adalah menumpas sisa-sisa warisan budaya kolonialisme, imperialisme, dan feodalisme yang masih mengakar kuat di kalangan rakyat.

Manifestasinya dapat dilihat dari bentuk kebodohan, pengecut, berwatak lemah, sampai rasa hina rendah tiada kemampuan untuk berbuat sampai bertindak. Dengan sikap dan tapan itulah Lekra mengembangkan daya jangkanya ke masyarakat luas (Dahlan, 2008, h. 23). Lekra menggaet berbagai macam kelompok masyarakat untuk melaksanakan revolusi, tidak tersekat identitas sosial tinggi atau rendah. Bagi Lekra, semuanya sama, yakni rakyat Indonesia yang harus menyatukan kekuatan untuk melaksanakan revolusi. Selain itu

dalam praktiknya, perjuangan di ranah kebudayaan menurut Lekra bisa dilakukan tanpa harus menunggu momentum lewat sentralisasi perintah pusat. Mengacu mukadimah 1950 yang direvisi pada Juli 1955 lewat Konferensi Nasional (Konfernas) pertama Lekra, praktik perjuangan ini diserahkan ke masing-masing daerah, sesuai konteks organisasi cabang. Menurut Keith Foulcher, "...Mukadimah mengambil karakter yang lebih voluntaris, yang lebih mudah digunakan untuk pengambilan keputusan sehari-hari pada level praktis" (Foulcher, 2021, h. 38). Dari Mukadimah yang telah direvisi ini, frasa rakyat menjadi diperluas. Kepentingan material semua kelas dalam masyarakat Indonesia, kecuali kaum borjuis komprador yang jumlahnya sedikit, kemudian termasuk ke dalam bagian "rakyat" (Foulcher, 2021, h. 39-40.).

Tetapi bukan berarti perjuangan Lekra anti terhadap budaya luar. Untuk memahami masalah proses kreatif Lekra, diperkenalkan secara ideologis laporan yang disahkan pada Kongres Nasional I Lekra di Solo, Januari 1959. Terdapat konsep "meluas dan meninggi". Pada gagasan ini, meluas harus diikuti oleh kemampuan meninggi. Selaku Sekretaris Jenderal yang disahkan pada Kongres Nasional I Lekra di Solo, Januari 1959, Joebaar Ajoeb, menegaskan jika konsep ini tidak dapat dipisahkan substansinya, seperti hanya meluas atau meninggi. "Meluas" berarti setia pada garis massa dan meninggi" berarti sekaligus mutu ideologi dan mutu artistik bagi pekerdja-pekerdja kesenian dan meningkatkan terus-menerus mutu ideologi dan mutu kedjuruan bagi pekerdja2 ilmu (Dahlan, 2008, h. 507).

Demi menjalankan konsep tersebut, Lekra menggunakan gerakan 1-5-1. Strategi ini dapat diartikan sebagai lima kombinasi kerja yang tersusun dari (1) meluas dan meninggi; (2) tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik atau 2 tinggi; (3) tradisi baik dan kekinian

revolusioner; (4) kreativitas individual dan kearifan massa; (5) realisme sosial dan romantik revolusioner. Lima kombinasi ini dapat berjalan ketika seniman melaksanakan turun ke bawah (Turba) untuk berkesenian bersama buruh dan tani. Posisi buruh dan tani dalam kesenian Lekra cukup krusial sebab bahan bakar proses kreatif seniman ada di sana. Tanpanya, perjuangan tidak berada di rel yang melenceng dari garis revolusi. Perlu dipertegas, posisi rakyat di sini bukan semata menjadi objek untuk keperluan berkesenian. Lewat strategi gerakan 1-5-1 dapat dipahami Lekra memposisikan kelas pekerja sebagai subjek aktif yang terlibat dalam unsur berkesenian. Sebab, "...bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada Rakjat, kalau kita belum tahu pasti apa yang mesti diberikannya?" (Sontani, 1962, h. 3). Maka dari itu, seniman diwajibkan masuk ke dalam kehidupan buruh dan tani.

Dalam spektrum politik, Lekra menemukan saudara ideologisnya dari PKI yang sama-sama menekankan komitmen sosial dalam derap perjuangan anti-imperialisme dan keberpihakan pada rakyat. Tetapi perlu digaris bawahi, PKI dan Lekra adalah organisasi yang berbeda. Meski secara keanggotaan ada yang menjabat di kedua organisasi berhaluan nasionalisme kiri ini. PKI dikemukakan setirnya pada Januari 1951 oleh empat pemuda yang umurnya belum menyentuh 30 tahun, yakni D.N Aidit, M.H Lukman, Njoto, dan Sudisman. Mereka meracik garis besar haluan partainya dengan mempertimbangkan kegagalan masa lalu. Pasalnya, insiden pemberangusan PKI di Madiun, Jawa Timur, pada tahun 1948, menampar keras partai yang berakibat pada lemahnya kekuatan internal dan kehilangan visi strategis akibat sang pimpinan, Musso, tewas di Ponorogo, Jawa Timur. Latar belakang semacam ini yang jadi pelajaran berharga oleh PKI di tangan empat pemimpin muda tersebut.

Khususnya Aidit yang menjadi ketua Politbiro CC PKI merombak strategi langkah partai agar lebih berhati-hati dan populis berasas kerakyatan.

Dalam melihat perubahannya, penting untuk menaruh perhatian pada Kongres V PKI yang diselenggarakan pada tahun 1954. Kongres ini menjadi peletak batu utama partai dalam merumuskan garis haluannya. Bahkan dengan sangat mencolok, kajian tentang apa pun evolusi ideologi PKI di era 1959-1965 bisa dilacak dari analisis dan preskripsi awal 1954, yang terus dimodifikasi-ulang berdasarkan inspirasi dan kedaruratan kasus yang muncul kemudian (Mortimer, 2011, h. 38). Di sini, garis besar haluan partai berdasarkan Kongres ke V adalah memperjuangkan pembentukan front nasional. Strategi ini menunjukkan sisi pragmatis PKI dalam bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain.

Kongres ke V itu dengan makna lain merupakan monumen penguburan tradisi PKI lawas yang identik dengan konfrontasi politik untuk merebut kekuasaan lewat yang mengutamakan kekuatan organisasi dan ideologi. Hanya front seluas itu itulah yang sanggup membentuk formasi kuat pemerintahan rakyat yang demokratis karena akan “dibentuk dari basis aliansi kaum pekerja, buruh, dan petani di bawah kepemimpinan kelas pekerja, dan berupaya mewujudkan “bukan reformasi sosialis melainkan reformasi demokratis (Mortimer, 2011, h. 41).

Konsep mengutamakan nasionalisme yang demokratis ini sangat mempengaruhi arah dan sikap politik PKI di ranah kebudayaan. Secara gamblang, evolusi strategi tertuang pada Sidang Pleno ke-IV yang dilaksanakan pada 1956. Di sini, posisi PKI persis seperti Lekra. Dalam laporan Sidang Pleno ke-IV, tertera jika: Tujuan kita adalah untuk menciptakan kebudayaan rakyat Indonesia Baru (Aidit, 1956, h. 52). Dengan kata lain, kebudayaan yang

baru diartikan budaya Indonesia anti-imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme. Pengambilan sikap politik yang terbuka untuk segala jenis perjuangan revolusioner di lapangan kebudayaan terbukti konsisten dan terbukti hingga tahun 1964.

Tahun tersebut begitu monumental karena PKI berhasil melaksanakan agenda besar yang menyangkut keberlangsungan kebudayaan nasional. Agenda bernama *Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner* (KSSR) yang dilaksanakan 27 Agustus sampai 2 September 1964 lahir. Ide untuk menyelenggarakan KSSR muncul dari Sidang Pleno II CC PKI pada akhir 1963 yang menekankan pentingnya menetapkan garis-garis dasar bagi terciptanya sastra dan seni revolusioner. KSSR diikuti oleh pekerja kebudayaan berhaluan komunis atau kelompok Manipolis-Revolusioner. Dalam Konferensi ini, Aidit menekankan pentingnya pedoman penciptaan seni lewat gaya “realisme revolusioner” dan “romantisme revolusioner”.

Selain itu, alasan lain didirikannya KSSR adalah untuk menghindari partai dari sifat berpuas diri. Kebudayaan menurut Aidit adalah bidang yang dapat dijadikan ukuran untuk memahami hati rakyat secara meluas. Oleh karena itu masalah mengintegrasikan diri dalam pikiran dan perasaan dengan massa Rakyat adalah masalah yang paling pokok bagi para sastrawan dan seniman revolusioner (Aidit, 1964, h. 9). Meski terkesan mencaplok identitas Lekra dengan klaim, “Lekra merupakan perwujudan dari usaha sajak Leninis dalam PKI ketika itu dan sekaligus merupakan salah satu perwujudan daripada mengangkat wawasan PKI”. (Aidit, 1964, h. 14).

Baik dari Lekra atau PKI, sikap keduanya terhadap kebudayaan nasional tidak bisa dilepaskan dari konteks zaman saat itu. Era Demokrasi terpimpin melahirkan Garis Besar

Haluan Negara (GBHN) bernama Manifesto Politik (Manipol) yang mencakup perumusan ulang untuk kembali serta berkehidupan dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK).

Melalui keterangan Sukarno dalam pidato yang menjadi Manipol USDEK, yaitu *Penemuan Kembali Revolusi Kita*, GBHN ini hadir karena: “Sebab seluruh rakyat merasa bahwa Undang-undang Dasar 1950 menekan jiwa revolusi, menghambat-mengendorkan jalannya arus revolusi, mematikan cara berpikir revolusioner, memberikan bumi subur kepada tumbuhnya segala macam aliran konvensional dan konservatif”. (Sukarno, 1959, h. 9).

Dengan kata lain, GBHN itu dianggap lahir dari kompromi politik pasca-KMB yang justru melemahkan semangat kolektif bangsa, melahirkan liberalisme, individualisme, hingga perpecahan politik melalui multipartai dan desentralisasi kekuasaan. Bagi Sukarno, selama bangsa tetap berpegang pada UUDS 1950, revolusi tidak akan pernah sampai pada cita-cita rakyat yang adil dan makmur. Dalam penilaiannya, Sukarno menarik garis yang lebih progresif lagi dalam penafsiran hakikat revolusi dengan menjatuhkan 17 Agustus 1945 sebagai tanda belum selesainya perjuangan rakyat. Sebab dalam pandangan Sukarno selain kegagalan UUDS 1950 serta Konstituante, rakyat Indonesia dari segi ekonomi, politik, sosial, sampai budaya masih dalam cengkaman kolonialisme, imperialisme, dan feodalisme.

Melalui serangkaian pemaparan tarik-menarik dan sebab-akibat sejarah yang sudah dijelaskan di atas, penelitian bertujuan utama untuk membongkar operasi wacana kebudayaan dalam surat kabar *Harian Rakyat* selama periode Demokrasi Terpimpin (1959–

1965). Secara fundamental, studi ini hendak membuktikan bahwa *Harian Rakjat* sebagai media resmi PKI berfungsi sebagai aparatus ideologis yang secara aktif memproduksi, mereproduksi, dan mempertarungkan wacana kebudayaan nasional di bawah hegemoni doktrin Manipol USDEK. Analisis berusaha diarahkan untuk menyingkap bagaimana bahasa digunakan sebagai praktik kuasa untuk menerjemahkan kehendak politik organisasi ke dalam kesadaran kolektif massa.

Secara operasional, penelitian bergerak untuk menampilkan evolusi strategi diskursif tersebut dalam tiga fase kronologis. Pertama, penelitian bermaksud menelisik bagaimana *Harian Rakjat* pada fase I (1959–1961) menjalankan strategi naturalisasi ideologi. Fokus analisis diarahkan pada penggunaan metafora organik dan mekanisme mitos untuk mengonstruksi kehadiran PKI serta Lekra bukan sebagai manuver politik, melainkan sebagai fenomena alamiah sejarah yang tak terelakkan dan tumbuh subur dari bumi Indonesia.

Selanjutnya, penelitian bertujuan memetakan pergeseran strategi wacana menuju mekanisme polarisasi dan antagonisme pada fase II (1962–1963). Pada tahap ini, analisis difokuskan untuk menjelaskan bagaimana bahasa digunakan secara ofensif untuk membangun rantai ekuivalensi yang membelah struktur sosial masyarakat secara biner. Tujuannya adalah menyingkap bagaimana wacana *Harian Rakjat* meniadakan ruang netralitas dengan menyamakan musuh budaya, seperti kelompok Manifes Kebudayaan, dengan musuh negara atau Nekolim yang harus disingkirkan dari gelanggang revolusi.

Terakhir, penelitian ini hendak menyingkap fantasi totaliter dan kegagalan tindakan radikal yang terjadi pada fase III (1964–1965). Tujuan analisis berpangku untuk mengungkap eskalasi bahasa yang bermetamorfosis menjadi instruksi komando dan agresi simbolik.

Penelitian berusaha menjelaskan bahwa radikalisasi wacana tersebut merupakan manifestasi dari fantasi ideologis subjek politik untuk menutupi keretakan realitas sosial dan kegagalan simbolisasi demokrasi menjelang meletusnya peristiwa 30 September 1965.

Dengan pengelompokan tiga fase perkembangan wacana, penelitian berusaha memperluas cakrawala kajian di Sastra Indonesia dengan menyoroti dinamika kebahasaan yang mengerucut pada konteks revolusi kebudayaan pada era Demokrasi Terpimpin. Penelitian ini ingin membuktikan jika paradigma tradisional yang membatasi fokus analisis atau objek kajian hanya berpangku pada teks sastra bisa diubah. Sebagai gambaran, penelitian Sastra Indonesia dengan fokus analisis yang mengandalkan objek kajian cerita pendek adalah jurnal *Cerpen-cerpen Lekra (1950—1965) sebagai strategi perjuangan politik PKI* karya Ahmad Syafa'at Junaidi, Sunu Wasono, dan Bastian Zulyeno. Ketiga peneliti itu berasal dari Universitas Indonesia. Kajian ilmiah ini terbit di DIGLOSIA: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya pada tahun 2023.

Dalam penelitian ini diterangkan bahwa objek yang dipilih adalah Cerpen Lekra yang terbit pada tahun 1950-1960. Sumber data primer adalah cerpen-cerpen Lekra yang berjudul Paman karya L.S. Retno, Gambar Pemimpin karya Saibun, Kebangunan di Kota Bengawan karya Namikakanda dan Loper karya Putu Oka. Keempat cerpen tersebut dimuat dalam antologi Laporan dari Bawah: Sehimipun Cerita Pendek Lekra *Harian Rakjat* 1950—1965 (Junaidi dkk, 2023, h. 1059). Untuk metode yang dipilih adalah deskriptif kualitatif. Sementara pisau analisis untuk membedah cerpen-cerpen tersebut menggunakan kerangka berpikir sosiologis dalam perspektif Rene Wellek dan Austin Warren.

Selain itu, terdapat jurnal lain yang bertajuk *Bentuk Resistensi Tertutup Kaum Tani dan Buruh dalam Cerpen-Cerpen Sastrawan Lekra di Koran Harian Rakjat* karya Moh. Fikri Zulfikar dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Kajian ilmiah ini terbit di *Narasi: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya* pada tahun 2023. Sumber data penelitian ini adalah 26 cerpen sastrawan Lekra yang dimuat di koran *Harian Rakjat* terbitan tahun 1950-1965 (Zulfikar, 2023, h. 220). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan pemahaman, pendeskripsian, serta penjelasan resistansi dalam karya sastra dilakukan dengan hermeneutika fenomenologi Paul Ricoeur.

Penelitian di atas memiliki orientasi yang dapat dilihat dari dua aspek. Pertama menghadirkan arsitektur metodologi yang selanjutnya ditopang oleh landasan teoritis interdisiplin secara kompleks. Berkaitan dengan yang pertama, kedua, hasilnya objek penelitian dibiarkan analisisnya lewat penggunaan metodologi serta landasan teoritis sederhana. Dengan kata lain, skripsi *Revolusi Kebudayaan Dalam Surat Kabar Harian Rakjat Era Demokrasi Terpimpin: Kajian Wacana Kritis Norman Fairclough* berbeda dari yang lain dan masih jarang diteliti karena membuka ruang epistemologis baru terhadap diskursus wacana sastra atau sejarah Indonesia. Sehingga dengan penelitian ini, diharapkan adanya kemajuan dalam diskursus di bidang sastra Indonesia atau fokus humaniora lainnya agar tidak stagnan pada tataran normatif.

1.2. Rumusan Masalah

Topik utama yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis operasi wacana kebudayaan secara kritis dalam koran *Harian Rakjat* pada era Demokrasi Terpimpin. Metodologi yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse*

Analysis), Norman Fairclough. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyingkap bagaimana bahasa berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang membentuk, memelihara, dan menegosiasikan relasi kuasa serta ideologi dalam masyarakat.

Dalam kerangka metodologis Fairclough, wacana dipahami sebagai arena di mana ideologi diproduksi dan disebarkan melalui bahasa. Bahasa tidak netral, melainkan selalu membawa muatan ideologis yang merefleksikan posisi sosial produsen maupun penerima teks. Oleh sebab itu, analisis wacana kritis digunakan untuk membongkar bagaimana *Harian Rakjat* bekerja sebagai aparat ideologis dan medium kultural dalam membentuk kesadaran politik rakyat pada masa Demokrasi Terpimpin.

Secara fungsional, metodologi analisis wacana kritis digunakan untuk dua kepentingan. Pertama, metodologi berperan sebagai pembatas sekaligus penegas wilayah agar pembacaan terhadap *Harian Rakjat* tidak meluas dan kehilangan arah ketika dikaitkan dengan teori-teori lintas disiplin yang menjadi landasan konseptual penelitian ini. Kedua, metodologi digunakan secara berlapis untuk membuat baku kriteria analisis wacana yang memungkinkan penelitian ini berjalan secara sistematis. Terdapat dua lapis penggunaan, yaitu kriteria analisis dan kategorisasi wacana.

Berdasarkan tiga kriteria analisis wacana kritis dalam kerangka berpikir Fairclough, terdapat unsur-unsur seperti deskripsi teks, interpretasi teks, dan eksplanasi teks. Adapun dimensi kategoris, yaitu praktik diskursif dan sosial. Rumusan masalah penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana dimensi tekstual dan praktik diskursif dalam kerangka Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough mengungkap transformasi strategi bahasa *Harian Rakjat*, dari naturalisasi ideologi (1959–1961) menjadi agitasi perang wacana (1964–1965)?
- 1.2.2. Bagaimana dimensi praktik sosial dalam kerangka Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough menjelaskan implikasi wacana *Harian Rakjat* sebagai aparatus ideologis yang mengonstruksi hegemoni budaya dan polarisasi politik di era Demokrasi Terpimpin?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis evolusi strategi wacana kebudayaan dalam koran *Harian Rakjat* pada era Demokrasi Terpimpin melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap bagaimana bahasa bekerja sebagai praktik kuasa yang dinamis dalam mereproduksi ideologi Manipol USDEK, membentuk relasi oposisi biner, serta memobilisasi subjek rakyat dari tahap legitimasi menuju tindakan ofensif.

Adapun tujuan khusus penelitian ini diuraikan sesuai dengan periodisasi wacana sebagai berikut:

- 1.3.1. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana *Harian Rakjat* pada fase awal (1959–1961) menggunakan strategi naturalisasi bahasa untuk mentransformasi ideologi politik menjadi mitos sejarah yang dianggap alamiah guna membangun legitimasi kebudayaan nasional.
- 1.3.2. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana *Harian Rakjat* pada fase pertengahan (1962–1963) membangun hegemoni antagonistik melalui mekanisme

polarisasi biner yang membelah masyarakat ke dalam rantai ekuivalensi "revolusioner" dan "kontra-revolusioner" serta meniadakan ruang netralitas.

- 1.3.3. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana *Harian Rakjat* pada fase akhir (1964–1965) melakukan radikalisasi wacana melalui militerisasi bahasa dan interpelasi subjek, di mana seniman dikonstruksi menjadi kader militan yang melakukan tindakan ofensif simbolik demi pemurnian revolusi.

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada *Manipol USDEK* sebagai entitas ideologis yang berperan dalam membentuk kebudayaan dan wacana politik rakyat pada era Demokrasi Terpimpin. Fokus utama penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana *Manipol USDEK* bekerja melalui bahasa, ideologi, dan representasi sosial dalam koran *Harian Rakjat* sebagai instrumen pembentukan kesadaran nasional.

Untuk menjaga ketajaman analisis, penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) dari Norman Fairclough sebagai metodologi utama. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menelusuri relasi antara deskripsi teks, interpretasi teks, dan penjelasan teks guna membongkar operasi ideologis yang tersembunyi di balik produksi makna dalam media.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi khazanah akademik, khususnya dalam bidang ilmu sastra, linguistik, sejarah, dan politik. Secara spesifik, skripsi ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika pertarungan ideologi dan kebudayaan di Indonesia melalui perspektif kebahasaan. Dengan menggunakan pisau bedah

Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) Norman Fairclough, penelitian ini berupaya membuktikan bahwa bahasa dalam arsip sejarah bukan sekadar alat komunikasi netral, melainkan medan kekuasaan yang aktif membentuk kesadaran sosial. Lebih jauh, penelitian ini menawarkan model analisis yang membangun sistematika metodologi berlapis, mengintegrasikan analisis tekstual dengan teori-teori sosial kritis untuk membedah strategi wacana di masa lampau.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian teori dan metodologi sebagai berikut:

1.5.1.1. Menambah kebaruan dalam penerapan teori dengan kerangka metodologis

Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) Norman Fairclough untuk menelaah keterkaitan antara bahasa, kekuasaan, dan produksi makna dalam teks budaya-politik.

1.5.1.2. Memberikan rujukan konseptual bagi penelitian yang ingin mengkaji peran

Manipol USDEK, PKI, dan Lekra dalam membangun mitos nasional, melakukan ekspansi kekuasaan ideologis, serta merasionalisasi kebudayaan rakyat pada masa Demokrasi Terpimpin.

1.5.1.3. Menunjukkan relevansi pendekatan interdisipliner dengan metodologi wacana

kritis Fairclough dalam membaca dinamika politik dan kebudayaan sebagai proses historis yang bersifat dialektis.

1.5.1.4. Memperkuat posisi analisis wacana kritis Norman Fairclough sebagai metodologi

yang tidak hanya menganalisis bentuk linguistik, tetapi juga menghubungkannya

dengan praktik sosial dan ideologis yang memproduksi realitas politik dan kebudayaan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengayaan wawasan bagi mahasiswa, peneliti, dan pembaca umum dalam memahami hubungan antara ideologi, kebudayaan, dan praktik politik Indonesia, sekaligus mendorong lahirnya kajian kritis dan interdisipliner yang menelusuri bagaimana Manipol USDEK membentuk serta mereproduksi wacana ideologis melalui bahasa dan media. Agar lebih tersistematis, penjelasan ini diurai sebagai berikut:

- 1.5.2.1. Menjadi bahan bacaan yang memperkaya wawasan tentang hubungan antara ideologi, kebudayaan, dan praktik politik dalam sejarah Indonesia, khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin.
- 1.5.2.2. Menginspirasi mahasiswa dan peneliti untuk mengembangkan penelitian kebudayaan politik dengan pendekatan teoritis yang lebih kritis, interdisipliner, dan berbasis analisis wacana.
- 1.5.2.3. Memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana dokumen politik seperti Manipol USDEK membentuk wacana, mitos, dan konflik sosial-politik di masyarakat melalui mekanisme representasi dan naturalisasi ideologi dalam bahasa.
- 1.5.2.4. Menjadi pijakan bagi kajian kebudayaan kontemporer yang ingin menelusuri bagaimana wacana ideologis terus direproduksi dalam media, kebijakan, dan konstruksi simbolik negara modern.

1.6. Keaslian penelitian (*State of Art*)

Penelitian mengenai dinamika kebudayaan dan politik pada masa Demokrasi Terpimpin, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan Partai Komunis Indonesia (PKI), telah banyak dilakukan oleh para sarjana sebelumnya. Namun, mayoritas kajian tersebut cenderung membatasi objek materialnya pada karya sastra kreatif (seperti cerpen atau puisi) dan menggunakan pendekatan sosiologis atau hermeneutik yang bersifat normatif. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah epistemologis tersebut dengan menawarkan kebaruan pada objek kajian dan metodologi.

Untuk memetakan posisi penelitian ini, penulis membandingkannya dengan dua penelitian relevan yang terbit pada tahun 2023. Pertama, penelitian Ahmad Syafa'at Junaidi, Sunu Wasono, dan Bastian Zulyeno (2023) dalam jurnal *DIGLOSIA* yang berjudul "*Cerpen-cerpen Lekra (1950—1965) sebagai strategi perjuangan politik PKI*". Penelitian ini menjadikan teks sastra berupa cerpen dalam antologi *Laporan dari Bawah* sebagai objek material. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Sastra Rene Wellek dan Austin Warren. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana cerpen berfungsi sebagai alat strategi politik partai. Perbedaannya dengan skripsi ini terletak pada objek dan pisau bedah; penelitian Junaidi dkk. berfokus pada karya fiksi dengan kacamata sosiologis, sedangkan penelitian ini berfokus pada wacana berita/esai dalam koran *Harian Rakjat* dengan pisau bedah Analisis Wacana Kritis.

Kedua, penelitian Moh. Fikri Zulfikar (2023) dalam jurnal *Narasi* yang berjudul "*Bentuk Resistensi Tertutup Kaum Tani dan Buruh dalam Cerpen-Cerpen Sastrawan Lekra di Koran Harian Rakjat*". Penelitian ini menganalisis 26 cerpen sastrawan Lekra

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Hermeneutika Fenomenologi Paul Ricoeur. Fokus kajiannya adalah pada pemahaman dan pendeskripsian bentuk resistensi kaum tani dan buruh yang termuat dalam teks sastra. Perbedaan mendasar dengan skripsi ini adalah Zulfikar melihat teks sebagai refleksi resistensi subjek (hermeneutik), sementara penelitian ini melihat teks sebagai aparatus ideologis yang memproduksi kuasa dan mitos (diskursif).

Berdasarkan pemetaan di atas, keaslian dan kebaharuan (*novelty*) penelitian ini dapat dirumuskan dalam tiga aspek utama. Jika penelitian terdahulu mayoritas terpaku pada teks sastra (cerpen), penelitian ini menjadikan arsip koran (berita, tajuk rencana, esai, pidato) dalam *Harian Rakjat* sebagai objek kajian utama. Hal ini dilakukan untuk menangkap dinamika wacana yang lebih cair dan langsung bersentuhan dengan realitas politik sehari-hari. Kemudian Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan sosiologi sastra atau hermeneutika konvensional, melainkan menerapkan metodologi Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough yang didialektikkan secara interdisipliner dengan teori Semiotika (Roland Barthes), Hegemoni (Laclau & Mouffe), dan Psikoanalisis Politik (Slavoj Žižek). Terakhir, penelitian ini menantang paradigma sejarah normatif yang melihat Manipol USDEK sekadar sebagai produk hukum atau ideologi negara. Sebaliknya, penelitian ini memosisikan Manipol USDEK sebagai entitas hidup dan mitos yang bekerja secara operasional melalui bahasa untuk melakukan interpelasi subjek, menaturalisasi kekuasaan, dan memisahkan kekuatan pencipta dari karyanya dalam kerangka revolusi kebudayaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala kajian Sastra Indonesia dan sejarah politik dengan melampaui analisis tekstual tradisional menuju analisis wacana yang membongkar relasi kuasa, ideologi, dan bahasa secara kritis.

